



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

URGENSI REVISI PENGATURAN KONSUMSI PRODUK LPG BERSUBSIDI 3 KG

Dewi Wuryandani

Analisis Legislatif Ahli Madya
dewi.wuryandani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Konsumsi *liquefied petroleum gas* (LPG) 3 kilogram (kg) sepanjang Januari-April 2024 mencapai 2,69 juta metrik ton. Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah dan PT Pertamina (Persero) karena konsumsi LPG 3 kg telah melampaui kuota bulanan dan diprediksi akan berlanjut hingga akhir tahun melampaui kuota tahunan. Untuk diketahui, pemerintah menetapkan kuota LPG 3 kg Januari-April 2024 sebesar 2,64 juta metrik ton, sedangkan kuota sepanjang 2024 ditetapkan sebesar 8,03 juta metrik ton. PT Pertamina (Persero) memproyeksi konsumsi produk bersubsidi tersebut sepanjang 2024 dapat mencapai 8,38 juta metrik ton bila tidak dilakukan pengelolaan yang baik. Kementerian ESDM pun pesimistis terhadap penyaluran LPG 3 kg pada tahun ini dan memperkirakan akan mencapai 8,12 juta metrik ton, meningkat dari yang telah ditetapkan dalam APBN.

Strategi menghadapi melonjaknya konsumsi LPG 3 kg dapat dilakukan dengan mewajibkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pembelian gas 3 kg. Penggunaan KTP merupakan kondisi sebelum pelaksanaan distribusi secara tertutup dengan tujuan subsidi yang digelontorkan pemerintah lebih tepat sasaran. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, menyatakan bahwa pihaknya akan mewajibkan penggunaan KTP untuk pembelian LPG 3 kg mulai 1 Juni 2024. Hal itu dilakukan untuk mendata sekaligus memastikan subsidi yang disalurkan melalui produk tersebut tepat sasaran. Hingga 30 April 2024, sudah ada 41,8 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar untuk program Subsidi Tepat LPG 3 kg. Dari jumlah tersebut, 88% di antaranya berasal dari sektor rumah tangga. Perinciannya, yaitu 35,9 juta NIK dari sektor rumah tangga, 5,8 juta NIK dari sektor usaha mikro, 70.300 NIK dari pengecer, 29.600 NIK dari nelayan sasaran, dan 12.800 NIK dari petani sasaran.

Namun, Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development, Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, menyatakan bahwa penggunaan KTP untuk pembelian LPG 3 kg belum cukup untuk mengatasi penyalahgunaan produk bersubsidi tersebut. Bisa saja nanti masyarakat yang mampu menggunakan KTP asisten rumah tangga-nya (ART) atau KTP orang lain, karena tidak ada beleid yang mengatur tentang kriteria pembelinya. Menurutnya, pemerintah harus segera merevisi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram, agar PT Pertamina (Persero) serta para agen dan pangkalan LPG memiliki dasar untuk menolak kelompok masyarakat tertentu membeli LPG 3 kg. Pembatasan konsumsi LPG 3 kg bukanlah hal yang mudah karena terkait banyak pihak, mulai dari agen, pangkalan, hingga importir LPG. Tidak sekadar pembatasan, pengaturan distribusi LPG 3 kg juga mesti disertai dengan kuota volume yang bisa diterima oleh rumah tangga maupun pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) per bulan. Dengan begitu, prinsip keadilan dalam penyaluran subsidi melalui LPG 3 kg bisa dilakukan karena sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.

Awalnya, distribusi tertutup akan dilakukan dengan menggunakan kartu khusus yang diberikan kepada masyarakat yang berhak. Akan tetapi, cara tersebut tidak dilanjutkan dan berhenti sampai pada tahap uji coba di beberapa wilayah. Saat ini pemerintah berupaya memadukan NIK dalam KTP dengan teknologi informasi yang dimiliki PT Pertamina (Persero). Nantinya, data yang terekam oleh PT Pertamina (Persero) bakal diselaraskan dengan data milik pemerintah sehingga dapat secara otomatis menyortir siapa saja yang berhak membeli LPG 3 kg. Penggunaan LPG 3 kg sendiri merupakan perubahan dari kebijakan subsidi minyak tanah yang dilakukan pemerintah sebagai upaya menekan beban anggaran. Fluktuatifnya harga minyak dunia ketika itu membuat pemerintah meningkatkan subsidi minyak tanah. Dengan perbaikan pola distribusi, diharapkan pemerintah tidak lagi melakukan konversi karena penerima subsidi akan lebih tepat sasaran.

Atensi DPR

Pada penghujung masa jabatan Presiden Joko Widodo, pemerintah menyodorkan rencana reformasi subsidi dan kompensasi untuk APBN yang diproyeksikan dapat memangkas alokasi tersebut hingga Rp67,1 triliun per tahun. Tahun 2024 ini pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp186,9 triliun, yang terdiri atas subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG sebesar Rp113,3 triliun, serta subsidi listrik sebesar Rp73,6 triliun. Langkah yang akan diambil pemerintah untuk menekan subsidi energi adalah pengetatan kategori konsumen LPG 3 kg. Pemerintah menargetkan pengendalian penerima subsidi LPG 3 kg dapat mengurangi konsumsi produk bersubsidi tersebut sebesar 1 juta ton per tahun. Komisi VII DPR RI perlu melakukan pengawasan terkait penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG 3 kg agar dapat selalu memenuhi kebutuhan, tersalurkan tepat sasaran, dan terjangkau oleh masyarakat yang berhak.

Sumber

Bisnis Indonesia, 28 dan 29 Mei 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024